

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PIUTANG TAK TERTAGIH PADA PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH SULSELBAR ULP ENREKANG

Analysis Of Internal Control Systems Bad Debt At PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselbar ULP Enrekang

Jumiati P

Email jumiati43@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani, Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, 91131

Abstract

The problem raised in this research is how the procedure for bad debt and how the implementation of the internal control system is bad debt at PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselbar ULP Enrekang. As for the purpose of this study analyze and determine the system of bad debt and the implementation of the internal control system for bad debt PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselbar ULP Enrekang. The research method adopted in this study is descriptive which describes the internal control system of bad debt PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselbar ULP Enrekang. The benefits of this research are scientific benefits and practical benefits. Data collection methods used in this study were observation, and interviews. The results of the study state that the procedure for bad debt in the event that the stages of electricity billing were effective, which were carried out in stages and the implementation of the bad debt internal control system at PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselbar ULP Enrekang has been effective with elements of internal control specifically in the component of its control activities.

Keywords: Internal control, receivables, bad debt

PENDAHULUAN

Perkembangan saat ini kebutuhan primer masyarakat saat ini di dunia bertambah. Dahulu kita mengenal bahwa kebutuhan primer hanya terbatas pada sandang, pangan, dan papan. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan-kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Salah satu kebutuhan yang sangat penting sekarang adalah kebutuhan listrik. Mulai dari rumah tangga, bisnis, perusahaan, instansi dan lainnya membutuhkan arus listrik untuk menunjang kesehariannya.

Listrik memiliki peranan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan air minum, kebutuhan hiburan, kebutuhan akan pekerjaan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya sangat memerlukan listrik. Listrik juga sangat dibutuhkan oleh perusahaan dan instansi dalam menjalankan proses bisnisnya. Dapat disimpulkan bahwa keseluruhan masyarakat di dunia membutuhkan aliran listrik untuk menjalani kehidupannya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan aliran listrik, masyarakat melakukan transaksi pembelian arus listrik dari pengelola listrik dari masing-masing Negara.

Sesuai dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2002 tentang ketenagalistrik penyelenggaraan usaha ketenagalistrik bertujuan untuk menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan observasi awal pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselbar ULP Enrekang banyak pelanggan baik dari rumah tangga, pelaku bisnis, instansi dan lain-lain yang tidak membayar piutang tepat waktu yang menyebabkan pergerakan piutang tak tertagih menjadi tinggi. Menurut Mulyadi (2014:87) Piutang merupakan klaim kepada pihak lain atas

uang, barang, atau jasa yang dapat diterima dalam jangka waktu satu tahun, atau dalam satu siklus kegiatan perusahaan.

Oleh karena itu, pengendalian intern terhadap piutang usaha ini sangat penting diterapkan. Kecurangan dalam siklus kerja sangat sering terjadi sehingga dapat merugikan perusahaan. Kecurangan yang sering terjadi pada bagian piutang usaha adalah tidak mencatat pembayaran dari debitur dan mengantongi uangnya, menunda pencatatan piutang dengan melakukan cash lapping, melakukan pembukuan palsu atas mutasi piutang, dan lain sebagainya. Sehingga rasio perputaran piutang PLN baik, penurunan tunggakan bisa terealisasi sehingga kinerja keuangan PLN menjadi baik.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengangkat judul yaitu "Analisis Sistem Pengendalian Intern Piutang Tak Tertagih Pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar ULP Enrekang".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah Penelitian kualitatif dimana metode kualitatif mencari makna, pemahaman, pengertian, verstehen tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung dan atau tidak langsung dalam setting yang diteliti, kontekstual, dan menyeluruh (A. Muri Yusuf, 2014 : 150).

Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar ULP Enrekang yang berlokasi di Jl. Pahlawan No. 1, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.

Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Observasi yaitu pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.
2. Teknik wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang kompeten dalam hal ini karyawan yang berwenang mengenai data.
3. Teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan data dan informasi melalui buku-buku, jurnal, internet dengan melakukan penelitian terhadap catatan atau dokumen yang ada seperti sejarah perusahaan dan data-data pendukung lainnya.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskripsif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode kualitatif mencari makna, pemahaman, pengertian, verstehen tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung dan atau tidak langsung dalam setting yang diteliti, kontekstual, dan menyeluruh (A. Muri Yusuf, 2014 : 150). Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif karena dalam penelitian ini menjelaskan secara rinci dan menyeluruh dalam menjawab masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian berupa data kualitatif yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan kepada 49 karyawan PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar ULP Enrekang.

1. Sistem Prosedur Piutang Tak Tertagih dalam Hal Tahapan penagihan rekening listrik yaitu,
 - a. Perencanaan penagihan rekening listrik
 - 1) Kebutuhan tempat pembayaran
 - 2) Kerja sama dengan pihak lain
 - 3) Jadwal penagihan
 - b. Persiapan Penagihan Rekening Listrik
 - 1) Pembacaan Meter
 - 2) Perhitungan rekening listrik
 - c. Pelaksanaan Penagihan rekening listrik
2. Sistem Pengendalian Intern Piutang Tak Tertagih PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar ULP Enrekang.
 - a. Penilaian Risiko

Penilaian risiko yang di lakukan pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar ULP Enrekang adalah risiko piutang tak tertagih, melakukan pencatatan pelanggan-pelanggan yang tidak bisa membayar piutangnya lalu catatan tersebut dijadikan pengendalian untuk pemasangan penyambungan listrik kembali oleh pelanggan tersebut.

Sehingga pelanggan harus melunasi tagihan terlebih dahulu baru bisa melakukan penyambungan kembali.

b. Informasi dan Komunikasi

Sistem Informasi dan komunikasi yang diterapkan pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar ULP Enrekang telah menggunakan sistem yang terkomputerisasi yaitu P2TL, AP2T, dan AIL.

c. Aktivitas Pengendalian

1) Otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai

Otorisasi dalam transaksi di PT. PLN (Persero) merupakan bagian penting dari pengendalian piutang. Pengendalian intern yang baik mensyaratkan bahwa tidak ada karyawan yang diiberi tanggung jawab terlalu banyak. Dalam pengendalian intern, maka fungsi pembukuan pelanggan, penagihan dan pengawasan kredit perlu dipisahkan. Hal ini bertujuan meminimalisasi masalah yang terjadi hanya karena dua atau lebih fungsi tersebut merupakan tanggung jawab satu orang.

2) Desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai

Penggunaan dokumen dengan terkomputerisasi dan sistem online di Kantor PLN (Persero) bisa mempermudah pengambilan data yang diperlukan kapan saja dan bisa diakses secara cepat. Akses yang mudah dan cepat dalam memperoleh data tentang piutang pelanggan dan dapat menghubungi pihak-pihak terkait dengan piutang pelanggan.

3) Penjagaan Asset

Penggunaan sistem online ini diakses dengan mudah dan cepat dalam memperoleh data tentang piutang pelanggan dan dapat menghubungi pihak-pihak terkait dengan piutang pelanggan dan data tersebut aman karena untuk mengaksesnya diperlukan password.

4) Pemisahan Tugas

Pengendalian yang baik mensyaratkan bahwa tidak ada karyawan yang diberi tanggung jawab terlalu banyak. Dalam pengendalian intern, maka fungsi pembukuan piutang, penagihan piutang, dan pengawasan kredit harus dipisahkan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisasi masalah yang terjadi hanya karena dua atau lebih fungsi tersebut merupakan tanggung jawab satu orang. Hal ini juga akan mengurangi kemungkinan terjadinya pencatatan piutang yang tidak wajar karena bisa saja untuk menutup-nutupi penyalahgunaan.

d. Pemantauan atau Monitoring

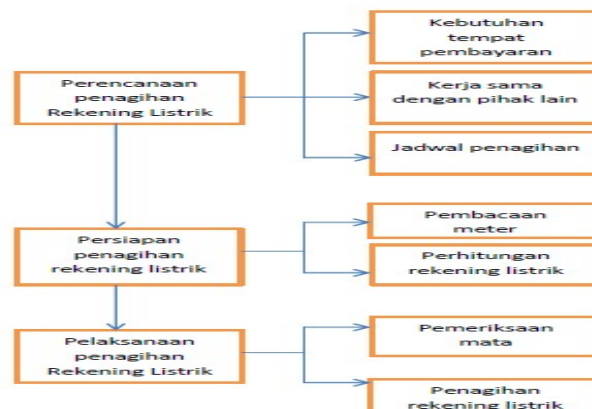
Pemantauan atau Monitoring yang dilakukan dalam pelaksanaan pengendalian yaitu pada saat pemeriksaan P2TL ditemukan pelanggaran pada pelanggan yang tidak memenuhi panggilan PLN sampai habis masa peringatan I. maka dilakukan penagihan terus menerus sampai pelanggan membayar tunggaknya.

Pembahasan

Berdasarkan uraian dari hasil wawancara maka pembahasan mengenai sistem prosedur piutang tak tertagih dalam hal tahapan penagihan rekening listrik dan komponen-komponen sistem pengendalian intern.

1. Sistem Prosedur Piutang Tak Tertagih dalam Tahapan Penagihan Rekening Listrik PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar ULP Enrekang. Berikut ini adalah tahap-tahap penagihan rekening listrik:

Gambar 5.3
Tahap-tahap Penagihan Rekening Listrik



Berdasarkan gambar 5.3, maka dapat dijelaskan mengenai tahapan dalam penagihan listrik adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan penagihan rekening listrik

Perencanaan penagihan rekening listrik terdiri dari:

 - 1) Perencanaan Kebutuhan Tempat Pembayaran

Perencanaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan pelayanan pembayaran rekening listrik kepada pelanggan dengan mudah, cepat, dan nyaman yang berorientasi kepada kepentingan pelanggan. Perencanaan tersebut meliputi : Lokasi, Jumlah Tempat Pembayaran, Jumlah Pelanggan Per Loker, Pelaksana Pelayanan, Jumlah Petugas.
 - 2) Perencanaan Kerja sama Antara PLN Dengan Pihak Lain

Dalam melaksanakan pelayanan penerimaan pembayaran rekening listrik yang berorientasi kepada pelanggan perlu dibuat perencanaan kerjasama dengan pihaklain dalam hal pengurusan penagihan atau penerimaan pembayaran piutang pelanggan. Perencanaan ini meliputi : Pola Kerjasama, Sistem Pelayanan, Agunan, Hak dan Kewajiban.
 - 3) Perencanaan Jadwal Penagihan

Pelaksanaan pembayaran rekening listrik bulan berjalan dilaksanakan setiap hari kerja mulai tanggal tanggal 01 sampai dengan tanggal 20.

- b. Persiapan Penagihan Rekening Listrik
 - 1) Pelaksanaan Pembacaan Meter

Prosedur penagihan pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar ULP Enrekang awalnya didasarkan pada berapa besar meteran listrik atau biaya pemakaian kwh setiap bulannya. Petugas PLN datang ke rumah-rumah pelanggan mencatat meteran yang telah terpakai, biasanya dilakukan pembacaan meter dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 30 untuk pembayaran.
 - 2) Perhitungan Rekening Listrik

Pendapatan rekening listrik di PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar ULP Enrekang dipengaruhi oleh unsur-unsur sebagai berikut : Golongan Tarif Dasar Listrik (TDL) merupakan dasar perhitungan yang berisi ketetapan harga jual dan golongan tarif tenaga listrik PLN. Golongan tarif adalah besarnya kwh yang digunakan sesuai dengan kontrak. Biaya beban adalah biaya yang dikenakan berdasarkan besarnya kontak VA (Volt Ampere) yang terpasang disetiap rumah pelanggan. Biaya pemakaian (kwh) merupakan biaya yang harus dibayar oleh pelanggan berdasarkan banyaknya kwh per bulan.

- c. Pelaksanaan Penagihan Rekening Listrik
 - 1) Proses penagihan rekening listrik

Langkah-langkah penagihan rekening listrik

 - a) Fungsi penagihan adalah fungsi yang melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian dalam kegiatan penagihan dan penerimaan pembayaran piutang pelanggan untuk seluruh pelanggan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pelaksanaan penagihan rekening listrik ini dilaksanakan sebulan sekali yang dimulai dari fungsi pembacaan meter, yang kemudian hasil baca meter, yang kemudian hasil baca meter tersebut diolah oleh fungsi pembuatan rekening untuk dijual kepada pelanggan PLN.
 - b) Persiapan penerimaan rekening listrik dari fungsi pembuatan rekening maupun dari fungsi pelayanan, terdiri dari : Daftar rekening listrik (TUL III-04), Fisik lembar rekening listrik (TUL III-03) dan kwitansi rupa-rupa, Data dalam media rekaman Komputer, Daftar pengiriman rekening listrik (TUL III-01). Rekening listrik dan daftar rekening listrik dan kwitansi rupa-rupa ditransfer ke dalam data induk saldo. Data ini digunakan sebagai data induk awal.

- c) Mutasi penambahan dan pengurangan sampai dengan saldo akhir perbulan maupun saldo seluruhnya diproses dengan media komputer. Sebelum perekaman data saldo rekening ke dalam data induk saldo ahrus diadakan pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan kebenaran data tersebut dengan membuat rekapitulasi penerimaan data rekening, kemudian dicocokkan dengan rekapitulasi rekening. Proses penggabungan data tersebut menghasilkan tabel-tabel tempat bayar (Payment Point) untuk seluruh unit-unit PLN.
 - d) Proses penggabungan rekening listrik menghasilkan data induk saldo loket PLN seluruh unit.
 - e) Persiapan pengiriman rekening listrik ke tempat pembayaran dilakukan dengan mempersiapkan daftar rekening listrik dalam bentuk media rekaman, fisik rekening, kwintansi rupa-rupa dan berita acara rekening listrik ke payment point oleh unit-unit PLN.
 - f) Pembuatan berita acara rekening listrik dan TUL V-01 telah sesuai dibuat oleh kantor PLN setempat untuk keperluan pengiriman file data maupun fisik rekening ke payment point.
 - g) Dilakukan penyerahan daftar rekening listrik dalam bentuk rekaman, fisik rekening listrik, kwitansi rupa-rupa, serta berita acara rekening listrik serta lampirann TUL V-01 ke tempat pembayaran atau payment point.
 - h) Setelah jadwal tanggal pembayaran tiba, pelanggan secara bergantian membayar tagihan rekening listrik di tempat-tempat pembayaran secara tertib dan teratur. Jadwal pelayanan penerimaan pembayaran setelah berakhirnya masa pembayaran yang telah ditentukan dilayani di kantor PLN area atau unit.
 - i) Guna mempercepat penerimaan pendapatan yang bersumber pada piutang pelanggan serta untuk memperlancar dan mempermudah pelayanan penerimaan pembayaran, telah disusun rencana jadwal pembayaran untuk masing-masing tempat pembayaran. Pelanggan dapat membayar ke loket-loket tersebut berdasarkan kode payment point yang ditentukan oleh PLN setempat.
 - j) Berdasarkan saldo pelunasan setiap hari akan dibuatkan: Daftar rekening yang lunas atau tidak lunas (TUL V-04), Bukti penyetoran uang ke kasir (TUL V-06), ikhtisar mutasi piutang pelanggan (TUL V-02). Berdasarkan tunggakan data induk saldo tanpa tunggakan pelanggan memperoleh kwitansi rupa-rupa
 - k) Data rekening listrik maupun data kwitansi rupa-rupa yang lunas akan dikirimkan ke PLN (Fungsi penagihan). Data rekening listrik maupun kwitansi rupa-rupa yang lunas tersebut dikirim ke PLN (Fungsi Penagihan) dengan melakukan proses copy data dari komputer tempat pembayaran ke media rekaman komputer.
 - l) Berdasarkan daftar rekening listrik yang lunas tersebut, loket-loket pembayaran mentransfer uang masing-masing pelanggan atau nasabah ke rekening pendapatan (Receipt Account) PLN cabang di bank PLN yang telah ditetapkan. Data rekening listrik maupun daftar kwitansi rupa-rupa yang lunas akan dikirimkan ke PLN (Fungsi Penagihan).
 - m) Kemudian kantor PLN cabang akan mencatat daftar rekening listrik yang lunas atau belum lunas yang telah di bayar di payment point, serta mencatat bukti penyetoran uang.
 - n) Pada akhir periode pembayaran akan di bentuk data tunggakan atau daftar pelanggan yang tidak lunas karena jadwal pelayanan pembayaran telah melewati masa pembayaran yang telah ditentukan tersebut di atas. Maka akan dilayani diloket kantor PLN cabang. Pengiriman data dapat menggunakan media rekaman komputer atau jaringan komunikasi komputer.
- 2) Pelayanan Penerimaan Rekening Listrik di tempat Pembayaran
- a) Pelayanan penerima pembayaran rekening listrik dengan cara giralisasi.
Giralisasi adalah pembayaran rekening listrik dengan cara transfer uang pelanggan di suatu bank dimana banknya PLN berbeda dengan banknya

pelanggan dan banknya pelanggan tersebut tidak melaksanakan pelayanan penerimaan pembayaran rekening listrik. Pembayaran rekening listrik dengan cara giralisis tersebut tidak langsung dapat dilakukan. Akan tetapi perlu di buat perjanjian antara PLN dengan bank yang bersangkutan. Perjanjian antara lain berisi; kesediaan bank untuk membayarkan uang pelanggan dengan cara mentrasfer uang tersebut ke rekening receipt PLN di bank yang ditunjuk oleh PLN pada waktu yang telah ditentukan, dan kesediaan bank untuk mengirim rekening listrik yang telah di lunasi melalui giralisasi kepada pelanggan PLN atau nasabah bank tersebut.

b) Pelayanan penerima pembayaran rekening listrik dengan cara legalisasi (Pengesahan)

Rekening listrik yang pembayarannya dibiayai dari APBN-HANKAM atau ABRI diselesaikan secara terpusat dengan cara legalisasi. Rekening listrik ini telah di buat dengan kode golongan I (ABRI). Kode golongan tersebut dibedakan menjadi: Angkatan darat : Golongan ID, Angkatan Laut : Golongan IL, Angkatan Udara : Golongan IU, POLRI : Golongan IP, Hankam/Mabes ABRI : Golongan IA.

c) Pelayanan penerimaan pembayaran rekening listrik yang dibiayai APBN atau APBD

Rekening listrik yang dibayar dengan dana APBN bukan HANKAM/ ABRI dan APBD-PEMDA. Pembayarannya diselesaikan dengan cara ditagih ke instansi yang bersangkutan. Rekening listrik yang dibayar dengan dana APBN ini adalah rekening listrik dengan kode golongan 2 dan yang dibayar dengan dana APBDN adalah rekening listrik dengan kode golongan 3.

d) Pelayanan pembayaran rekening listrik beban PLN

Beban PLN cabang /Rayon/Ranting/Sub ranting/kantor jaga intern unit yang bersangkutan. Rekening listrik yang menjadi beban PLN dalam rangkap 3 yaitu: Lembar asli untuk FBL atau Fungsi Pembukuan Pelanggan, tembusan pertama untuk fungsi akuntansi, dan tembusan kedua untuk FPN atau fungsi penagihan. Daftar tersebut dilampiri rekening listrik dan dikirim ke fungsi akuntansi dengan menggunakan daftar pengiriman rekening listrik (TUL V-01) dalam rangkap 3 : lembar asli FPN tembusan kedua untuk fungsi akuntansi, dan tembusan ketiga untuk FPL.

Daftar rekening yang lunas untuk FBL disertai dengan segi pelunasan. Berdasarkan daftar tersebut, fungsi akuntansi memorial jurnal dngan tembusan yang dikirim ke FPN dan FBL.

Beban PLN untuk unit lain. Rekening listrik yang menjadi beban PLN untuk unit lain dibuatkan daftar pengiriman rekeningn listrik (TUL V-01) dalam rangkap 3: Lembar asli untuk FBL tembusan pertama fungsi akuntansi, dan tembusan kedua untuk FPN. Berdasarkan daftar tersebut, fungsi akuntansi membuat nota pemindahbukuan untuk dikirim ke unit lain beserta fisik rekening listriknya. Tembusan nota pemindahbukuan dikirim ke FPN dan FBL untuk di catat pada iktisar mutasi rekening listrik (TUL V-02).

3) Pembuatan pemberitahuan pelaksanaan pemutusan sementara sambungan tenaga listrik

Bagi pelanggan yang belum melunasi rekening listrik pada waktu yang telah ditentukan, maka PT. PLN mengirimkan surat pemberitahuan pemutusan sementara sambungan tenaga listrik. Pemutusan sementara dilakukan kepada pelanggan apabila:

- i. Pada waktu pemeriksaan P2TL ditemukan cukup bukti telah terjadi pelanggaran pada pelanggan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan P2TL;
- ii. Pada waktu pemeriksaan P2TL ditemukan degaan telah terjadi pelanggaran dan pelanggaran tidak memenuhi panggilan PLN sampai habis masa peringatan I;
- iii. Pelanggan datang memenuhi panggilan PLN, tetapi pelanggan mengulur waktu sehingga menghambat proses penyelesaian P2TL; atau

- iv. Pelanggan tidak melunasi Tagihan susulan dan biaya P2TL lainnya sesuai jangka waktu atau tahapan yang telah ditetapkan pada SPH.
 - 4) Pembuatan Pemberitahuan Pelaksanaan Pembongkaran rampung
Pembongkaran rampung dilakukan apabila :
 - i. Pelanggan yang melakukan pelanggaran yang tidak memenuhi panggilan PLN sampai dengan habisnya masa peringatan II.
 - ii. Sampai dengan 2 (dua) bulan sejak Pemutusan sementara, pelanggan belum melunasi Tagihan Susulan yang telah ditetapkan atau belum melaksanakan pembayaran Tagihan Susulan sesuai SPH.
- 2. Sistem Pengendalian Intern Piutang Tak Tertagih**
- a. **Penilaian Risiko**
Penilaian risiko dalam pengendalian intern sudah efektif, hal ini ditunjukkan dengan adanya melakukan pencatatan pelanggan-pelanggan yang tidak bisa membayar piutangnya lalu catatan tersebut dijadikan pengendalian untuk pemasangan penyambungan listrik kembali oleh pelanggan tersebut. Sehingga pelanggan harus melunasi tagihan terlebih dahulu baru bisa melakukan penyambungan kembali.
 - b. **Informasi dan Komunikasi**
Informasi dan komunikasi yang digunakan PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar ULP Enrekang dalam penggunaan sistem online merupakan cara yang efektif bagi mereka memungkinkan orang-orang dalam organisasi untuk mendapatkan dan bertukar informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan operasinya.
 - c. **Aktivitas Pengendalian**
 - 1) **Otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai**
Otorisasi dalam transaksi merupakan bagian penting dari pengendalian piutang. Pengendalian intern yang baik mensyaratkan bahwa tidak ada karyawan yang diberi tanggung jawab terlalu banyak. Dalam pengendalian intern, maka fungsi pembukuan pelanggan, penagihan dan pengawasan kredit perlu dipisahkan . Hal ini bertujuan meminimalisasi masalah yang terjadi hanya karena dua atau lebih fungsi tersebut tersebut merupakan tanggung jawab satu orang. Fungsi pembukuan pelanggan yaitu melakukan pengendalian terhadap piutang pelanggan (pada akhir semester), biaya keterlambatan, piutang ragu-ragu dan angsuran piutang. Fungsi penagihan yaitu fungsi yang melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian dalam kegiatan penagihan dan penerimaan pembayaran piutang pelanggan untuk seluruh pelanggan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan fungsi pengawasan kredit yaitu fungsi yang melakukan perencanaan , persiapan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian dalam kegiatan pemutusan sementara, penyambungan kembali, pemutusan rampung bagi pelanggan yang terlambat membayar piutang pelanggan dan menyelesaikan penghapusan piutang ragu-ragu (Tagihan kepada pelanggan atas pemakaian data dan energi listrik karena sesuatu hal diluar kewenangan dan kemampuan PT. PLN tagihan tersebut sukar ditagih dan diragukan pembayarannya).
 - 2) **Desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai**
Desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai sudah efektif, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan dokumen dengan terkomputerisasi dan sistem online pada PT. PLN (Persero) bisa mempermudah pengambilan data yang diperlukan kapan saja dan bisa diakses secara cepat. Akses yang mudah dan cepat dalam memperoleh data tentang piutang pelanggan dan dapat menghubungi pihak-pihak terkait dengan piutang pelanggan. Namun, dalam pengambilan data menggunakan jaringan khusus PLN saja.
 - 3) **Penjagaan Asset**
Penggunaan sistem online ini diakses dengan mudah dan cepat dalam memperoleh data tentang piutang pelanggan dan dapat menghubungi pihak-pihak terkait dengan piutang pelanggan dan data tersebut aman karena untuk mengaksesnya diperlukan password. Serta menggunakan jaringan yang hanya diketahui oleh pihak tertentu atau PLN.
 - 4) **Pemisahan Tugas**

Pengendalian yang baik mensyaratkan bahwa tidak ada karyawan yang diberi tanggung jawab terlalu banyak. Dalam pengendalian intern, maka fungsi pembukuan piutang, penagihan piutang, dan pengawasan kredit harus dipisahkan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisasi masalah yang terjadi hanya karena dua atau lebih fungsi tersebut merupakan tanggung jawab satu orang. Hal ini juga akan mengurangi kemungkinan terjadinya pencatatan piutang yang tidak wajar karena bisa saja untuk menutup-nutupi penyalahgunaan.

5) Pemantauan atau Monitoring

Pemantauan atau Monitoring yang dilakukan PT. PLN (Persero) dalam piutang tak tertagih pelanggan sudah efektif, hal ini menunjukkan bahwa pelanggan yang ingin melakukan menyambungkan kembali dan terdaftar sebagai pelanggan sebelumnya yang memiliki catatan tunggakan, maka pelanggan tersebut harus melunasi terlebih dahulu sebelum menyambung kembali.

3. Pembahasan Penelitian Terdahulu

Edy Siswanto dan Miftahurrohman (2017) Hasil penelitian menyatakan bahwa Koperasi ini dalam melakukan lebih banyak operasi melakukan transaksi kredit atau penjualan kredit daripada tabungan, dalam hal ini penjualan kredit perusahaan memiliki sejumlah besar piutang, dalam transaksi piutang sering kali masih banyak piutang bermasalah, sudah jatuh tempo tetapi masih belum membayar, adanya kredit macet itu mengumpulkan. Ketiadaan control internal pada piutang menyebabkan banyak masalah dalam pembuatan laporan. Perhitungan jumlah piutang masih manual, sehingga butuh waktu lama untuk memperoleh data dan ada tidak ada riwayat pinjaman debitur. Perusahaan membutuhkan pengendalian internal atas piutang, untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai pihak yang bermasalah piutang, tindakan yang dapat dilakukan perusahaan adalah untuk menyiapkan kriteria untuk lamanya piutang, yang hingga saat ini belum bisa dikumpulkan, menggunakan metode umur piutang, hingga piutang yang telah jatuh tempo tetapi belum membayar dan menghitung jumlah piutang tak tertagih, dan usia keterlambatan piutang cepat dan akurat. Sedangkan PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar ULP Enrekang sudah melakukan terkomputerisasi dalam hal mencatat piutang, serta penghapusan piutang ragu-ragu yang di sahkan oleh UP3 Pinrang. Penggunaan sistem online ini diakses dengan mudah dan cepat dalam memperoleh data tentang piutang pelanggan dan dapat menghubungi pihak-pihak terkait dengan piutang pelanggan dan data tersebut aman karena untuk mengaksesnya diperlukan password dan jaringan khusus PLN.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Sistem prosedur piutang tak tertagih dalam hal tahapan penagihan rekening listrik sudah efektif dimana dilakukan secara bertahap.
2. Pelaksanaan pengendalian intern piutang tak tertagih pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar ULP Enrekang sudah efektif dengan unsur-unsur pengendalian intern terkhusus pada komponen aktivitas pengendaliannya

Saran

1. Perusahaan dapat memberikan diskon-diskon dan hadiah dengan kriteria tertentu dan sanksi tegas dan terlaksana yang dapat membuat pelanggan terpacu agar segera melunasi utangnya tanpa menimbulkan efek kerugian yang terlalu besar bagi perusahaan sehingga tidak terjadi penumpukan piutang pada awal tahun.
2. Melihat tahun sebelumnya perusahaan memiliki piutang yang tertunggak cukup tinggi karena beberapa faktor tertentu salah satunya karena tempat pembayaran yang sulit dijangkau pelanggan maka diharapkan perusahaan dapat bekerja sama dengan aparat desa untuk menempatkan agen-agen pembayaran rekening listrik agar mudah dijangkau oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Mulyadi. 2014. Auditing. Buku 2. Salemba Empat: Jakarta.

Mulyadi. 2014. Auditing. Buku 1. Salemba Empat: Jakarta.

Siswanto, Edy dan Miftahurrohman, 2017, Sistem Informasi Pengendalian Intern Atas Piutang Untuk Meminimalkan Jumlah Piutang Tak Tertagih pada KSU Makmur Mandiri Menggunakan Metode Umur Piutang, *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Vol. 8 No. 2 September 2017, Komputerisasi Akuntansi STEKOM Semarang.

Undang-undang Republik Indonesia No. 20. Tahun 2002, Tentang Ketenaga Listrikan.

Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian*. Kencana: Jakarta.